

# **ANALISIS PENGARUH ZAKAT, INFAQ, SHADAQOH (ZIS), SUKUK DAN PEMBIAYAAN SYARIAH TERHADAP PDB DI INDONESIA TAHUN 2009-2018**

*THE ANALYSIS OF ZAKAT, INFAQ, SHADAQAH (ZIS), SUKUK AND SHARIA  
FINANCING EFFECT TOWARDS GROSS DOMESTIK PRODUCT (GDP) A CASE  
STUDY FROM INDONESIA IN 2009-2018*

<sup>1)</sup>Siti Sumiyati, <sup>2)</sup>Whinarko Juliprijanto, <sup>3)</sup>Panji Kusuma Prasetyanto  
<sup>(1,2,3)</sup>Fakultas Ekonomi, Universitas Tidar, Magelang, Indonesia

[Sumisitig7@gmail.com](mailto:Sumisitig7@gmail.com)

## **Abstrak**

Produk Domestik Bruto (PDB) adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu pada periode tertentu. Peningkatan PDB yang positif seringkali tidak diimbangi dengan terdistribusinya kekayaan dan pendapatan masyarakat. Untuk mendorong pertumbuhan PDB, kegiatan ekonomi perlu didukung agar tumbuh dengan baik. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), dan wawancara terhadap penerima bantuan modal usaha dari BAZNAS Kota Magelang. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis pengaruh ZIS, sukuk dan pembiayaan syariah terhadap PDB di Indonesia tahun 2009-2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ZIS (X1) berpengaruh tidak signifikan terhadap PDB di Indonesia tahun 2009-2018, sukuk (X2) dan pembiayaan syariah (X3) berpengaruh signifikan terhadap PDB di Indonesia tahun 2009-2018. Secara bersama-sama ZIS, sukuk dan pembiayaan syariah berpengaruh signifikan terhadap PDB di Indonesia tahun 2009-2018.

**Kata kunci:** PDB, ZIS, Sukuk, Pembiayaan Syariah

## **Abstract**

*Gross Domestic Product (GDP) is the total value added generated by all business units in a country in a certain period. Increases in GDP is not always matched by the distribution of people's wealth and income. To encourage growth of GDP, then economic activities need to be supported in order to grow well. This research is quantitative descriptive. The data used are secondary data and primary data obtained from the Central Bureau of Statistics (BPS), the Financial Services Authority (OJK), the National Zakat Agency (BAZNAS), and interviews with recipients of venture capital assistance from BAZNAS Magelang City. The analysis technique used is multiple linear regression analysis. The purpose of this study was to analyze the effect of ZIS, sukuk and Islamic finance on GDP in Indonesia in 2009-2018. The results showed that ZIS (X1) had no significant effect on GDP in Indonesia in 2009-2018, sukuk (X2) and Islamic financing (X3) had a significant effect on GDP in Indonesia in 2009-2018. Together variables ZIS, sukuk and Islamic financing have a significant effect on GDP in Indonesia in 2009-2018.*

*Keywords:* GDP, ZIS, Sukuk, Islamic Financing

## PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi di suatu negara bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Peran pemerintah sebagai mobilisator pembangunan mempunyai fungsi penting dan strategis dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Indonesia merupakan negara berkembang yang terus berupaya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan Produk Domestik Bruto yang optimal dan merata. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan salah satu faktor dalam menciptakan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat dari aspek ekonomi dapat diukur dengan tingkat pendapatan nasional salah satunya dengan melihat Produk Domestik Bruto. Produk Domestik Bruto (PDB) adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu pada periode tertentu. PDB juga dipandang sebagai pendapatan nasional sehingga secara logika dapat diargumentasikan bahwa semakin besar PDB semakin besar pendapatan masyarakat, maka semakin makmur negara tersebut (Fajar, 2018: 2).

Menurut Tambunan, (2016: 2), Peningkatan PDB menjadi salah satu target yang sangat penting yang harus dicapai dalam proses pertumbuhan ekonomi.

Perekonomian suatu negara dapat diukur dari jumlah barang dan jasa baik dipandang dari sisi konsumsi maupun produksi. Nilai dari produksi dan jasa inilah yang menjadi pusat perhitungan dalam menentukan jumlah PDB (Produk Domestik Bruto).

**Tabel 1.** Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia tahun 2009-2018

Tahun	PDB (Rp Miliar)	PDB (%)
2009	6.461.950.900	1,0622%
2010	6.864.133.100	1,0616%
2011	7.287.635.300	1,0603%
2012	7.727.083.400	1,0550%
2013	8.156.497.800	1,0500%
2014	8.564.866.600	1,0487%
2015	8.982.517.100	1,0503%
2016	9.434.613.400	1,0506%
2017	9.912.928.100	1,0516%
2018	10.425.397.300	1,0502%

*Sumber : Badan Pusat Statistik, 2018*

Berdasarkan tabel 1 menunjukkan bahwa Produk Domestik Bruto Indonesia pada tahun 2009 menunjukkan Rp6.461.950.900. pada tahun 2010 mengalami peningkatan menjadi Rp6.864.133.100. Tahun 2011 juga mengalami peningkatan menjadi Rp7.287.635.300, PDB Indonesia terus mengalami peningkatan sampai tahun 2018. Akan tetapi rata-rata kenaikan PDB Indonesia hanya 0.010 %.

Peningkatan PDB yang positif seringkali tidak diimbangi dengan terdistribusinya kekayaan dan pendapatan

masyarakat. Salah satu variabel yang menjamin keadilan dalam pertumbuhan ekonomi sebuah negara adalah adanya keseimbangan distribusi pendapatan dan kekayaan. Untuk mendorong pertumbuhan PDB, kegiatan ekonomi perlu didukung agar tumbuh dengan baik. Salah satu cara untuk mendukung kegiatan ekonomi adalah dengan memberi modal kepada para pengusaha, termasuk didalamnya yaitu UMKM. Indonesia melalui BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) telah mencanangkan program penyaluran dana ZIS ke sektor produktif yaitu dengan cara pemberian modal ke UMKM.

Penyaluran ZIS ke sektor produktif diharapkan dapat memberdayakan mustahik miskin untuk mengembangkan usahanya melalui pemberian modal usaha secara bergulir. Selama ini masyarakat miskin sangat kesulitan untuk mengembangkan usahanya dikarenakan akses permodalan ke lembaga keuangan yang mengharuskan adanya syarat-syarat tertentu yang tidak dimiliki oleh mustahik miskin. Pengembangan ZIS dapat dijadikan sebagai modal usaha untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya. Usaha mustahik miskin yang konsisten, akan menghasilkan pendapatan tetap serta dapat meningkatkan usahanya. Dengan berkembangnya usaha kecil menengah dengan modal yang berasal dari penyaluran ZIS akan menyerap tenaga

kerja, sehingga dapat mengurangi pengangguran yang akan berdampak pada peningkatan daya beli masyarakat terhadap barang dan jasa. Hal itu menyebabkan bertambahnya produksi, dan pertumbuhan sektor produksi inilah yang menjadi salah satu indikator bertambahnya PDB.

**Tabel 2.** Penyaluran Zakat, Infaq, Shadaqoh (ZIS) ke Sektor Produktif tahun 2009-2018  
*Sumber : Badan Amil Zakat Nasional, data diolah*

Tahun	Penyaluran ZIS (Rp Miliar)
2009	2.690.407.916
2010	2.840.239.124
2011	3.830.071.318
2012	2.702.450.367
2013	2.276.167.586
2014	4.085.138.566
2015	3.632.478.301
2016	16.817.459.238
2017	17.446.196.908
2018	30.186.969.056

Berdasarkan tabel 2 menunjukkan bahwa dari tahun 2009 sampai 2018 penyaluran ZIS ke sektor produktif mengalami fluktuasi. Akan tetapi cenderung mengalami kenaikan. Kenaikan tersebut dikarenakan semakin meluasnya kesadaran masyarakat muslim Indonesia untuk mengeluarkan/membayar ZIS. Perzakatan di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat dinamis seiring dengan perkembangan zaman. Hal tersebut dapat dilihat setidaknya dari tiga aspek.

Pertama, Indonesia telah memiliki regulasi mengenai pengelolaan zakat dalam UU No. 23/2011 dan regulasi turunannya yang terangkum dalam PP No. 14/2014 dan Inpres No. 3/2014.

Seiring dengan perkembangan distribusi ZIS, maka adanya penyaluran dana ZIS ke sektor produktif dengan cara pemberian modal usaha dapat mendorong *mustahik* untuk mengembangkan usahanya, sehingga hal tersebut dapat menumbuhkan investasi baru. Disisi lain Indonesia terus melakukan upaya dengan menumbuhkan investasi dalam meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi. Investasi ada berbagai macam jenis, diantaranya adalah pasar modal. Keberadaan pasar modal saat ini merupakan suatu realitas terkini yang tengah terjadi di kehidupan masyarakat. Keuangan syariah global sudah bergulir sampai pada perkembangan produk syariah di pasar modal. Pasar modal syariah merupakan salah satu elemen penting yang sedang berkembang dalam keuangan syariah sebagai penunjang perbankan syariah, asuransi syariah, dan lembaga keuangan syariah lainnya (Andri, 2014: 39 dalam Hidayati, 2019:2).

Investasi merupakan instrumen yang memiliki urgensi strategis dalam sebuah negara. Investasi tidak hanya berkontribusi langsung terhadap pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB), bahkan juga ikut

berkontribusi besar bagi perekonomian dan masyarakat pada umumnya melalui investasi di korporasi. Pertumbuhan ekonomi akan menjadi lebih pesat salah satunya dengan meningkatkan efisiensi penanaman modal (investasi) yang dijalankan. Pertumbuhan ekonomi suatu negara baru dimungkinkan jika investasi neto lebih besar daripada nol. Peningkatan investasi akan memberikan dampak signifikan bagi perkembangan dan pertumbuhan ekonomi negara (Faiza, 2018:1578).

Obligasi syariah atau sukuk adalah surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah, yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah (sukuk), yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil atau margin, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo (Fatwa No. 32/DSN-MUI/IX/2002). Menurut Direktorat Pengelolaan Utang Departemen Keuangan, sukuk pada prinsipnya mirip seperti obligasi konvensional, dengan perbedaan pokok antara lain berupa penggunaan konsep imbalan dan bagi hasil sebagai pengganti bunga, adanya suatu transaksi pendukung (*underlying transaction*) berupa sejumlah aset tertentu yang menjadi dasar penerbitan sukuk, dan adanya *akad* atau perjanjian antara para pihak, yang disusun berdasarkan prinsip-

prinsip syariah. Selain itu, sukuk juga harus aman dan terbebas dari *riba*, *gharar* dan *maysir*. Sukuk hanya beredar pada bisnis perusahaan yang sesuai dengan syariat islam atau perusahaan yang tidak melanggar syariat islam. Hal ini dikarenakan pembayaran yang dilakukan oleh emiten kepada pemegang obligasi syariah tidak berbentuk bunga melainkan menggunakan mekanisme pendapatan.

Menurut PT Bursa Efek Indonesia, berdasarkan penerbitnya, sukuk terbagi menjadi dua macam, yaitu sukuk yang diterbitkan oleh perusahaan atau emiten dikenal dengan istilah sukuk korporasi dan sukuk yang diterbitkan oleh pemerintah atau negara yang disebut sebagai Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau sukuk global. Pada tahun 2002, Dewan Syariah Nasional mengeluarkan fatwa No: 32/DSN-MUI/IX/2002 tentang obligasi syariah. Sebagai implementasi atas fatwa tersebut, perkembangan sukuk dimulai pada Oktober 2002 ketika PT. Indosat Tbk mengeluarkan obligasi syariah yang pertama kali di pasar modal. Selain itu, disahkannya UU No. 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (Pada tahun 2010 muncul fatwa No: 76/DSN-MUI/VI/2010 mengenai SBSN Ijarah *Asset To Be Leased* dengan memperluas struktur penerbitan SBSN) atau UU SBSN menjadi saat yang penting bagi pengembangan. Undang-undang dan

fatwa tersebut diharapkan mampu menunjang aspek regulasi dalam penerbitan sukuk sehingga mendorong perkembangan sukuk domestik termasuk pasar sukuk korporasi (Dewi, 2011). Berdasarkan data yang diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sukuk korporasi di Indonesia dari tahun ketahun mengalami peningkatan.

**Tabel 3.** Perkembangan Jumlah Nilai Total Sukuk Korporasi

Tahun	Emisi Sukuk (Rp Miliar)	Outsanding (Rp Miliar)
2009	7.015,00	5.621,00
2010	7.815,00	6.121,00
2011	7.915,40	5.876,00
2012	9.790,40	6.883,00
2013	11.994,40	7.553,00
2014	12.872,00	7.144,00
2015	16.656,00	9.902,00
2016	20.425,00	11.878,00
2017	26.394,00	15.740,00
2018	36.122,00	22.023,00

Sumber : Otoritas jasa Keuangan, data diolah

Berdasarkan pada tabel 3 menunjukkan bahwa sukuk korporasi mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahun meskipun pada tahun 2009 emisi sukuk hanya mencapai Rp7.015,00 miliar paling rendah dalam sepuluh tahun terakhir, hal tersebut dikarenakan masih menguatnya dampak krisis ekonomi global pada tahun 2008. Sampai akhir tahun 2018 sudah ada 177 penerbitan sukuk korporasi dengan total nilai emisi mencapai

Rp36.122,00 miliar. Berdasarkan data OJK sukuk korporasi baru berkontribusi 16% pada pasar modal. Kontribusi tersebut tergolong masih rendah apabila dibandingkan dengan obligasi konvensional.

Sektor keuangan memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan berbagai sektor ekonomi. Ini dikarenakan lembaga perbankan mampu memobilisasi surplus modal dari pihak ketiga untuk diinvestasikan ke berbagai sektor ekonomi yang membutuhkan pembiayaan. Ketika sektor keuangan bertumbuh secara baik maka akan semakin banyak sumber pembiayaan yang dapat dialokasikan ke sektor-sektor produktif dan akan semakin bertambah pembangunan fisik modal yang bisa diciptakan yang nantinya akan berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan dan kinerja positif sektor keuangan akan berkorelasi positif terhadap kinerja ekonomi suatu negara. Sektor keuangan bisa menjadi sumber utama pertumbuhan sektor riil ekonomi. Semakin banyak alokasi dana pihak ketiga perbankan yang dialokasikan pada sektor-sektor riil maka akan semakin berkurang tingkat pengangguran dan kemiskinan dalam sebuah perekonomian (Deti, 2017: 2).

Pengembangan ekonomi keuangan syariah dibutuhkan untuk memperkuat struktur ekonomi dan pasar keuangan

dalam mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang bebas dari *riba*, *gharar* dan *maysir*. Hal ini dilandaskan pada potensi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah yang cukup menjanjikan. Kemampuan bank syariah mendukung perkembangan sektor riil yang dapat diamati dari pembiayaan yang disalurkan ke sektor ekonomi dan didukung oleh kemampuan mengelola pembiayaan. Gejolak ekonomi dan keuangan global menjadi salah satu tantangan dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Ketidakseimbangan global semakin melebar. Kesenjangan dalam hal penguasaan faktor produksi, pendidikan dan pendapatan dapat menghambat terwujudnya perekonomian yang tumbuh merata, adil, proporsional dan berkelanjutan. Pengembangan ekonomi dan keuangan syariah diharapkan menjadi salah satu upaya dalam memperkuat struktur ekonomi dan pasar keuangan global saat ini dan mendatang. Ekonomi dan keuangan syariah memiliki potensi yang besar sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru (Bank Indonesia, 2018).

**Tabel 4.** Total Pembiayaan Syariah pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Berdasarkan Akad Tahun 2009-2018

	Total Pembiayaan BUS dan UUS (Rp Miliar)
2009	46.886
2010	68.181

2011	102.655
2012	147.505
2013	184.122
2014	199.330
2015	212.996
2016	248.007
2017	285.695
2018	320.193

*Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, data diolah.*

Berdasarkan tabel 1.4 menunjukkan bahwa total pembiayaan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah mengalami peningkatan secara konstan. Peningkatan tersebut dikarenakan bertambah banyaknya jumlah perbankan syariah dari tahun ke tahun, pada tahun 2009 jumlah Bank Umum Syariah sebanyak 717 unit menjadi 1.868 unit tahun 2018. Sedangkan Unit Usaha Syariah tahun 2009 sebanyak 312 menjadi 347 unit pada tahun 2018. Selain itu peningkatan pembiayaan syariah juga disebabkan bertambahnya total aset perbankan syariah yang mencapai Rp451.202 miliar pada tahun 2018 dan bertambahnya Dana Pihak Ketiga (DPK) yang mencapai Rp354.421 miliar. Akan tetapi walaupun pembiayaan syariah terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, pembiayaan syariah masih kalah bersaing dengan pembiayaan konvensional. Pada tahun 2018 penyaluran kredit perbankan konvensional mencapai Rp517.132 miliar, sedangkan perbankan syariah hanya mencapai Rp320.123.

## **METODE PENELITIAN**

### **Desain Penelitian**

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Dalam melakukan analisis data penulis menggunakan aplikasi Eviews 10.

### **Variabel Penelitian**

1. Produk Domestik Bruto (PDB)
2. Zakat, Infak, Shadaqoh (ZIS)
3. Sukuk
4. Pembiayaan Syariah

### **Teknik Pengumpulan Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder diambil dari web resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

### **Teknik Analisis Data**

#### **1. Uji Asumsi Klasik**

Uji Asumsi Klasik yang terdiri dari Uji Multikolinearitas, Uji Normalitas, Uji Heteroskedastisitas, dan Uji Autokorelasi.

#### **2. Regresi Linear Berganda**

Model regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

Keterangan:

Y = PDB (miliar rupiah)

X<sub>1</sub> = ZIS (miliar rupiah)

X<sub>2</sub> = sukuk korporasi (miliar rupiah)

X<sub>3</sub> = pembiayaan syariah (miliar

rupiah)

$\beta_0$  = Konstanta (nilai Y apabila  $X_1, X_2, X_3 = 0$ )

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$  = Koefisien regresi (nilai peningkatan ataupun penurunan)

$\varepsilon$  = Error

### 3. Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Digunakan untuk melihat seberapa jauh variasi perubahan variabel dependen mampu dijelaskan oleh variasi/ perubahan variabel independen. Nilai koefisien determinasi adalah diantara nol dan satu.

### 4. Uji t

Uji t untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen, apakah pengaruhnya signifikan atau tidak.

### 5. Uji f

Uji F atau uji koefisien regresi secara serentak, yaitu untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara serentak terhadap variabel dependen, apakah pengaruhnya signifikan atau tidak.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Uji Asumsi Klasik

#### 1. Uji Multikoleniaritas

Dapat diketahui nilai tolerance dan nilai VIF untuk masing-masing variabel penelitian sebagai berikut :

1. Nilai VIF sebesar  $1.954231 < 10$ , sehingga variabel ZIS dinyatakan tidak terjadi gejala

multikoleniaritas.

2. Nilai VIF sebesar  $3.328917 < 10$ , sehingga variabel sukuk dinyatakan tidak terjadi gejala multikoleniaritas.
3. Nilai VIF sebesar  $2.860042 < 10$ , sehingga variabel Pembiayaan syariah dinyatakan tidak terjadi gejala multikoleniaritas.

### 2. Uji Normalitas

Nilai Probabilitas JB sebesar  $1,124148 > 0.05$  sehingga dapat disimpulkan bahwa residual berdistribusi normal.

### 3. Uji Heteroskedastisitas

Nilai Prob. F dan Chi-Square lebih besar dari nilai alpha-nya (0.05), sehingga dapat dipastikan model tersebut tidak mengalami gejala heteroskedastisitas.

### 4. Uji Autokorelasi

Nilai Prob. F dan Chi-Square lebih besar dari nilai alpha-nya (0.05), sehingga dapat dipastikan model tersebut tidak mengalami gejala Autokorelasi.

### Analisis Regresi Linear Berganda

Dependent Variable: PDB\_Y\_

Method: Least Squares

Date: 02/23/20 Time: 16:05

Sample: 2009 2018

Included observation: 10

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob
ZIs X1_	-0.098725	0.053517	-1.844758	0,1146
SUKUK X2_	0.224197	0.053793	4.167772	0.0059
PEMBIAYAAN_SYARIAH_X3	0.015924	0.001822	8.737864	0.0000
$\bar{C}$	5.61E+09	5.07E+08	11.07197	0.0000
R-squared	0.916150	Mean dependent var		8.38E+09
Adjusted R-squared	0.874225	S.D. dependent var		1.32E+09
S.E. of regression	4.68E+08	Akaike info criterion		43.05607
Sum squared resid	1.32E+18	Schwarz criterion		43.17711
Log likelihood	-211.2804	Hannan-Quinn criter.		42.92330
F-statistic	21.85206	Durbin-Watson stat		1.643249
Prob(F-statistic)	0.001248			

Nilai konstanta sebesar 5.61 dan koefisien regresi  $\beta_1 = -0.098725$ ,  $\beta_2 = 0.224197$ ,  $\beta_3=0.001822$ . Nilai konstanta dan koefisien regresi ( $\alpha$ ,  $\beta_1$ ,  $\beta_2$ ,  $\beta_3$ ) ini dimasukkan dalam persamaan regresi linier berganda berikut ini:

$$Y = 5.6100009 - 0.098725 X_1 + 0.224197 X_2 + 0.001822 X_3 + e$$

Selanjutnya dari regresi linier berganda tersebut, dapat diinterpretasikan hasil sebagai berikut :

1. Nilai konstanta sebesar 5.6100009 artinya apabila variabel ZIS (X1), sukuk (X2) dan pembiayaan syariah (X3) bernilai nol atau konstan, maka nilai PDB Indonesia adalah 5.6100009 rupiah.
2. Koefisien regresi variabel ZIS (X1) adalah -0.098725. Artinya apabila variabel ZIS meningkat 1 rupiah dan variabel lainnya konstan, maka akan menurunkan terhadap PDB Indonesia sebesar 0.098725 rupiah. Dengan

anggapan bahwa variabel Sukuk (X2) dan pembiayaan syariah (X3) tetap.

3. Koefisien regresi variabel sukuk (X2) adalah 0.224197. Artinya apabila variabel sukuk meningkat 1 rupiah dan variabel lainnya konstan, maka akan menyebabkan peningkatan terhadap PDB Indonesia sebesar 0.224197 rupiah. Dengan anggapan bahwa variabel ZIS (X) dan pembiayaan syariah (X3) tetap.
4. Koefisien regresi variabel pembiayaan syariah (X3) adalah 0.001822. Artinya apabila variabel pembiayaan syariah meningkat 1 rupiah dan variabel lainnya konstan, maka akan menyebabkan peningkatan terhadap PDB Indonesia sebesar 0.001822 rupiah. Dengan anggapan bahwa variabel ZIS (X1) dan Sukuk (X2) tetap.

#### Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Nilai R<sup>2</sup> (R square) adalah 0.874225

Hal ini menunjukkan 87,4 persen variasi variabel dependen PDB dapat dijelaskan oleh variabel-variabel independen ZIS, sukuk, dan pembiayaan syariah. Sementara sisanya sebesar 12,6 persen dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar model tersebut.

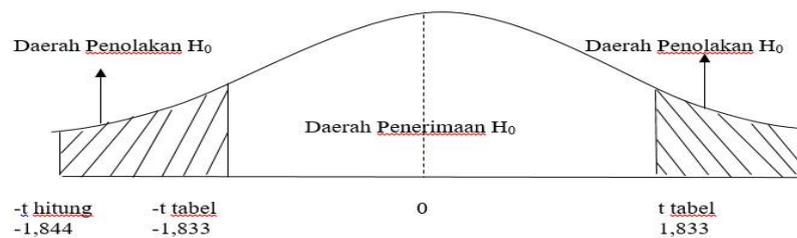
## Uji t

### 1. ZIS

Nilai koefisien ZIS adalah sebesar -0.098275 dan signifikansi untuk variabel ZIS sebesar 0.1146 dinyatakan lebih besar dari taraf  $\alpha = 0,05$  ( $0.1146 > 0,05$ ). Hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai

signifikansi variabel ZIS lebih besar dari 0,05 maka hipotesis ditolak yang berarti variabel ZIS ada berpengaruh tapi tidak signifikan terhadap variabel PDB.

Hal ini ditunjukkan juga dengan nilai  $t_{hitung} = -1.84475$  dan nilai  $t_{tabel}$  dengan menggunakan (signifikansi = 0,05), pada derajat kebebasan  $df (n-k) = 10 - 4 = 6$  adalah 1.833, sehingga  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $-1.844 > 1.833$ ). Dengan demikian  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel ZIS ada pengaruh tapi tidak signifikan terhadap PDB.

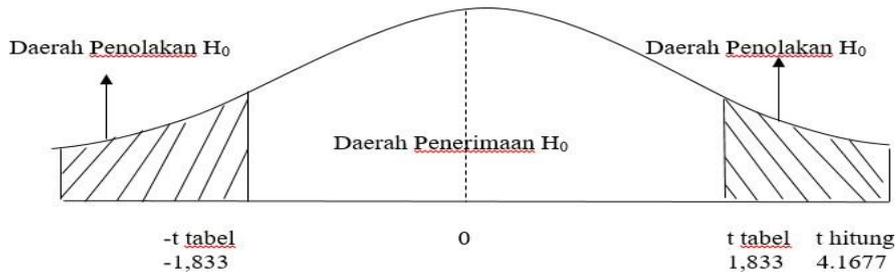


Gambar 1. Hasil Uji t ZIS

### 2. Sukuk

Nilai koefisien Sukuk adalah sebesar 0.22419 dan signifikansi untuk variabel sukuk sebesar 0.0059 dinyatakan lebih kecil dari taraf  $\alpha = 0,05$  ( $0.0059 < 0,05$ ). Hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai signifikansi variabel sukuk lebih kecil dari 0,05 maka hipotesis diterima yang berarti variabel sukuk berpengaruh signifikan terhadap variabel PDB.

Hal ini ditunjukkan juga dengan nilai  $t_{hitung} = 4.167772$  dan nilai  $t_{tabel}$  dengan menggunakan tingkat keyakinan 95 persen dan menggunakan uji dua sisi (signifikansi = 0,05), pada derajat kebebasan  $df (n-k) = 10 - 4 = 6$  adalah 1.833, sehingga  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $4.167772 > 1.833$ ). Dengan demikian  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel sukuk ada pengaruh dan signifikan terhadap PDB.



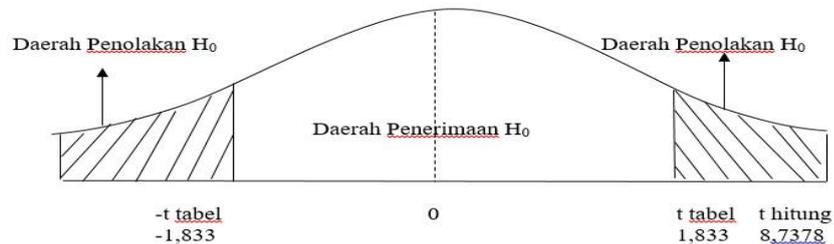
Gambar 2. Hasil Uji t Sukuk

### 3. Pembiayaan Syariah

Nilai koefisien pembiayaan syariah adalah sebesar 0.015924 dan signifikansi untuk variabel pembiayaan syariah sebesar 0.0000 dinyatakan lebih kecil dari taraf  $\alpha = 0,05$  ( $0.0000 < 0,05$ ). Hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai signifikansi variabel pembiayaan syariah lebih kecil dari 0,05 maka hipotesis diterima yang berarti variabel pembiayaan syariah berpengaruh signifikan terhadap variabel

PDB.

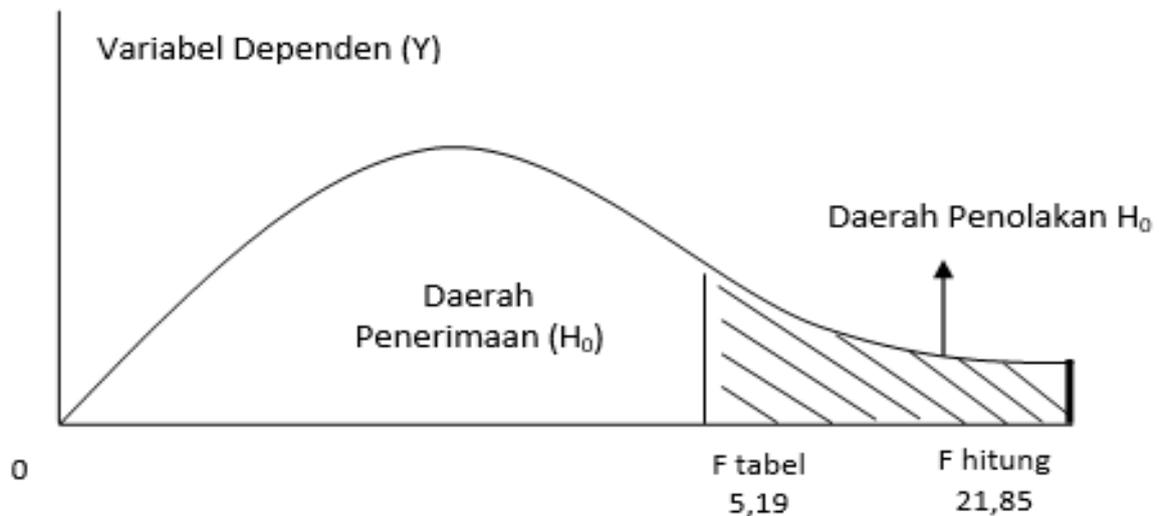
Hal ini ditunjukkan juga dengan nilai  $t_{hitung} = 8.737864$  dan nilai  $t_{tabel}$  dengan menggunakan tingkat keyakinan 95 persen dan menggunakan uji satu sisi (signifikansi = 0,05), pada derajat kebebasan  $df (n-k) = 10 - 4 = 6$  adalah 1.833, sehingga  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $8.737864 > 1.8333$ ). Dengan demikian  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel pembiayaan syariah ada pengaruh positif dan signifikan terhadap PDB.



Gambar 3. Hasil Uji t Pembiayaan Syariah Uji f

Pengaruh variabel ZIS, sukuk, dan pembiayaan syariah terhadap PDB dengan nilai  $F_{hitung}$  sebesar 21.85206 dengan signifikansi sebesar 0.000000 lebih kecil dari taraf signifikansi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 0,05 ( $0.000000 < 0,05$ ). Juga dibuktikan dengan perbandingan  $F_{hitung}$  dengan  $F_{tabel}$ , maka diperoleh  $F_{tabel} df = (k-1, n-k) = (4-1, 10-4) = (4, 15)$ ;  $\alpha 5\% = 5.19$  sedangkan  $F$

statistik atau  $F_{hitung}$  sebesar 21.85206 sehingga menunjukkan perbandingan antara  $F_{hitung} > F_{tabel}$  ( $21.85206 > 5.19$ ). Dengan demikian pengujian hipotesis tersebut menolak  $H_0$  dan menerima  $H_a$ . Maka dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh dari variabel ZIS, sukuk, dan pembiayaan syariah secara bersama-sama berpengaruh terhadap PDB.



Gambar 4. Hasil Uji F

## Pembahasan

### Pengaruh ZIS Terhadap PDB

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan dalam penelitian ini, dapat diketahui Hasil estimasi menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi ( $\beta_1$ ) ZIS sebesar  $-0.098725$  artinya bahwa apabila terjadi peningkatan 1 rupiah, maka akan meningkatkan PDB sebesar  $-0.098725$  rupiah dengan asumsi variabel lain dianggap tetap. Sedangkan dari pengujian uji t dapat dilihat bahwa variabel ZIS memiliki  $t_{hitung}$  sebesar 1.844758. Dengan menggunakan tingkat keyakinan 95% dan menggunakan analisis satu sisi diperoleh nilai  $t_{tabel}$  sebesar 1.833, sehingga dapat disimpulkan bahwa ZIS secara statistik berpengaruh tapi tidak signifikan terhadap PDB.

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Tambunan (2016) yang menyatakan bahwa

penyaluran ZIS berpengaruh signifikan terhadap PDB. Penyebab variabel zakat infaq sedekah berpengaruh tidak signifikan terhadap PDB di Indonesia antara lain karena pengelolaan zakat di Indonesia belum optimal meskipun pemerintah telah mengeluarkan undang-undang tentang pengelolaan zakat. Salah satu faktor penyebabnya yaitu faktor sistem dan kelembagaan. Undang-undang tersebut belum sepenuhnya menertibkan tata kelola zakat sesungguhnya, seperti tidak diberlakukannya efek jera terhadap muzakki yang lalai membayar zakat atau bentuk punishment terhadap keterlambatan membayar zakat (Mufidah, 2016).

Jumlah ZIS yang berhasil diterima dan disalurkan khususnya untuk bantuan bagi *mustahik* pemilik usaha dari tahun 2009-2018 cenderung mengalami kenaikan. Tetapi nilai tersebut masih sangat kecil jika dibandingkan dengan PDB Indonesia.

Akan tetapi walaupun ZIS belum berpengaruh secara signifikan terhadap PDB, variabel penyaluran ZIS ke sektor produktif perlu dikembangkan dan terus ditingkatkan. Hal ini sesuai hasil wawancara yang diambil dari BAZNAS Kota Magelang.

Berdasarkan hasil observasi yang penulis peroleh dari *mustahik* penerima bantuan modal usaha dari BAZNAS Kota Magelang dari 17 sampel yang diambil, rata-rata pendapatan mereka mengalami kenaikan setelah diberi bantuan. Bantuan tersebut digunakan untuk menambah bahan baku dan membeli alat produksi. *Mustahik* yang menerima bantuan modal usaha tidak ada kewajiban untuk mengembalikan bantuan tersebut ke BAZNAS Kota Magelang. Sehingga pendapatan yang mereka peroleh menjadi *hask* sepenuhnya *mustahik*.

### **Pengaruh Sukuk Terhadap PDB**

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan dalam penelitian ini, dapat diketahui bahwa nilai koefisien regresi ( $\beta_2$ ) sukuk sebesar 0.0224197 artinya bahwa apabila terjadi peningkatan sukuk 1 rupiah, maka akan terjadi peningkatan terhadap PDB sebesar 0.0224197 rupiah dengan asumsi variabel lain dianggap tetap. Sedangkan dari pengujian uji t dapat dilihat bahwa variabel sukuk memiliki  $t_{hitung}$  sebesar 4.167772. Dengan menggunakan

tingkat keyakinan 95% dan menggunakan analisis satu sisi diperoleh nilai  $t_{tabel}$  sebesar 1.833, sehingga dapat disimpulkan bahwa sukuk secara statistik berpengaruh signifikan terhadap PDB.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian dari Nurlaili dan Safiyatun (2018) yang menunjukkan bahwa adanya pengaruh signifikan antara sukuk korporasi dan PDB. Sukuk mempengaruhi pertumbuhan ekonomi melalui PDB melalui pendanaan dari penerbitan sukuk korporasi ( *corporate sukuk* ), dimana ketika suatu perusahaan menerbitkan surat utang atau sukuk maka perusahaan tersebut akan mendapatkan dana ketika surat utang tersebut telah terjual. Adanya tambahan dana dari penerbitan sukuk dapat meningkatkan kapasitas produksi. Kapasitas produksi yang meningkat diharapkan meningkatkan produksi menjadi lebih banyak, sehingga perekonomian dapat tumbuh. Pada akhirnya peningkatan output tersebut yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Tantangan yang dihadapi adalah *share* sukuk terhadap obligasi yang masih stagnan di kisaran 5%. Masalah dalam pengembangan sukuk korporasi di Indonesia lebih didominasi aspek pelaku pasar dan regulasi. Sehingga diperlukan kajian terkait supply dan demand sukuk korporasi. Dari sisi supply antara lain mendorong BUMN untuk turut serta listing (mengeluarkan) efek sukuk korporasi.

Sementara sisi demand, yakni mendorong perbankan syariah untuk turut menempatkan dananya di sukuk. Literasi kepada masyarakat mengenai sukuk juga sangat diperlukan.

Dengan dukungan dana sukuk tersebut perusahaan-perusahaan akan lebih cepat merealisasikan proyek-proyek pengembangan perusahaan yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Ketika perusahaan yang pertama kali menerbitkan sukuk, maka perusahaan akan mendapatkan pendanaan untuk investasi. Pendanaan tersebut didapat dari penerbitan sukuk korporasi (corporate sukuk), dimana ketika suatu perusahaan menerbitkan surat utang atau sukuk maka perusahaan tersebut akan mendapatkan dana ketika surat utang tersebut telah terjual. Adanya tambahan dana dari penerbitan sukuk dapat meningkatkan kapasitas produksi. Kapasitas produksi yang meningkat diharapkan meningkatkan produksi menjadi lebih banyak, sehingga diharapkan perekonomian dapat tumbuh. Pada akhirnya peningkatan output tersebut yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi.

### **Pengaruh Pembiayaan Syariah Terhadap PDB**

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan dalam penelitian ini, dapat diketahui bahwa nilai koefisien regresi ( $\beta_3$ ) pembiayaan syariah sebesar 0.015924 artinya bahwa apabila terjadi peningkatan

pembiayaan syariah 1 rupiah, maka akan terjadi peningkatan terhadap PDB sebesar 0.0159247 rupiah dengan asumsi variabel lain dianggap tetap.

Sedangkan dari pengujian uji t dapat dilihat bahwa variabel sukuk memiliki  $t_{hitung}$  sebesar 8.737864. Dengan menggunakan tingkat keyakinan 95% dan menggunakan analisis satu sisi diperoleh nilai  $t_{tabel}$  sebesar 1.833, sehingga dapat disimpulkan bahwa pembiayaan syariah secara statistik berpengaruh signifikan terhadap PDB.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian dari Ade Ananto dan Ali Rama (2017) yang menyatakan bahwa variabel pembiayaan syariah berpengaruh signifikan terhadap PDB. Juga pada hasil penelitian yang dilakukan oleh Imam Asngari (2017) yang menyatakan bahwa variabel pembiayaan syariah berpengaruh signifikan terhadap PDB.

Koefisien parameter pembiayaan syariah yang positif dapat dijelaskan bahwa pembiayaan syariah secara khusus berkontribusi signifikan dalam PDB fungsi intermediasi yaitu mobilisasi dana dari pihak pemodal (surplus unit) dan selanjutnya menyalurkan kepada sektor-sektor ekonomi produktif. Dengan demikian, perbankan syariah sebagai lembaga intermediasi secara empiris menjadi pemicu terjadinya peningkatan sisi permintaan ekonomi dan selanjutnya

berdampak pada peningkatan output. Meskipun pertumbuhan ekonomi mengalami gejolak seiring dengan melemahnya nilai tukar dan defisit neraca perdagangan, akibat melemahnya ekspor dan membengkaknya impor migas dan jasa-jasa, namun pembiayaan bank syariah terus mengalami peningkatan seolah tidak terpengaruh dengan gejolak eksternal. Hal inilah yang membuktikan bahwa perekonomian yang ditunjang dengan perkembangan yang pesat dari perbankan bebas riba, akan tetap mampu memacu sektor riil untuk tumbuh dan terus berkembang. Dampaknya, pertumbuhan ekonomi yang bergejolak dapat dihindari dan PDB semakin meningkat.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dalam penelitian ini, maka diperoleh kesimpulan :

1. ZIS (X1) berpengaruh tapi tidak signifikan terhadap PDB Indonesia (Y). Maka dengan meningkatnya ZIS akan berpengaruh terhadap penurunan PDB Indonesia.
2. Sukuk (X2) berpengaruh signifikan terhadap PDB Indonesia (Y). Maka dengan meningkatnya Sukuk akan berpengaruh terhadap peningkatan PDB Indonesia.
3. Pembiayaan syariah (X3) berpengaruh

signifikan terhadap PDB Indonesia (Y). Maka dengan meningkatnya pembiayaan syariah akan berpengaruh terhadap peningkatan PDB Indonesia.

4. ZIS, sukuk, dan pembiayaan syariah berpengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap PDB Indonesia. Hal ini menunjukkan dengan meningkatnya ZIS, sukuk, dan pembiayaan syariah secara bersama-sama, maka akan dapat meningkatkan PDB Indonesia.

### Saran

Berdasarkan kesimpulan yang didapat, maka saran yang dapat diberikan, yaitu sebagai berikut :

1. Selain diberikan bantuan modal, juga perlu dilakukan pembinaan dan pendampingan. Agar dana ZIS dapat berpengaruh besar terhadap usaha mikro *mustahik*, maka besaran dana ZIS untuk bantuan modal usaha seharusnya ditambah sehingga bisa berpengaruh signifikan dalam mengembangkan usaha mikro para *mustahik*.
2. Dari sisi supply antara lain mendorong BUMN untuk turut serta listing (mengeluarkan) efek sukuk. Sementara sisi demand, yakni mendorong perbankan syariah untuk turut menempatkan dananya di sukuk.
3. Menambah pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* dalam proyek investasi skala besar seperti proyek pembangunan

ekonomi nasional misalnya proyek investasi infrastruktur seperti jalan, jembatan, perumahan dan bangunan. Meningkatkan sosialisasi dan edukasi agar positioning bank syariah di mata nasabah semakin kuat.

4. Optimalisasi ZIS, sukuk dan pembiayaan syariah melalui edukasi dan regulasi agar pangsa pasar produk syariah lebih luas sehingga dapat menyumbang ke PDB lebih besar.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Asngari, Imam. 2014. Pengaruh Pembiayaan Bank Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. Prosiding seminar nasional. ISBN : 979-587-522-1 630-648.
- Badan Amil Zakat Nasional. 2009. Laporan Keuangan Tahun 2009. Diakses dari <https://www.BAZNAS.go.id> . Pada tanggal 10 Januari 2020.
- Badan Amil Zakat Nasional. 2010. Laporan Keuangan Tahun 2010. Diakses dari <https://www.BAZNAS.go.id> . Pada tanggal 10 Januari 2020.
- Badan Amil Zakat Nasional. 2011. Laporan Keuangan Tahun 2011. Diakses dari <https://www.BAZNAS.go.id> . Pada tanggal 10 Januari 2020.
- Badan Amil Zakat Nasional. 2012. Laporan Keuangan Tahun 2012. Diakses dari <https://www.BAZNAS.go.id> . Pada tanggal 10 Januari 2020.
- Badan Amil Zakat Nasional. 2013. Laporan Keuangan Tahun 2013. Diakses dari <https://www.BAZNAS.go.id> . Pada tanggal 10 Januari 2020.
- Badan Amil Zakat Nasional. 2014. Laporan Keuangan Tahun 2014. Diakses dari <https://www.BAZNAS.go.id> . Pada tanggal 10 Januari 2020.
- Badan Amil Zakat Nasional. 2015. Laporan Keuangan Tahun 2015. Diakses dari <https://www.BAZNAS.go.id> . Pada tanggal 10 Januari 2020.
- Badan Amil Zakat Nasional. 2016. Laporan Keuangan Tahun 2016. Diakses dari <https://www.BAZNAS.go.id> . Pada tanggal 10 Januari 2020.
- Badan Amil Zakat Nasional. 2017. Laporan Keuangan Tahun 2017. Diakses dari <https://www.BAZNAS.go.id> . Pada tanggal 10 Januari 2020.
- Badan Amil Zakat Nasional. 2017. Outlook Zakat Indonesia. Jakarta: Pusat Kajian Strategis BAZNAS. Diakses dari [https://www.puskasbaznas.com/images/outlook/OUTLOOK\\_ZAKAT\\_2017\\_PUSKASBAZNAS.pdf](https://www.puskasbaznas.com/images/outlook/OUTLOOK_ZAKAT_2017_PUSKASBAZNAS.pdf). pada tanggal 20 Januari 2020.
- Badan Amil Zakat Nasional. 2018. Laporan Keuangan Tahun 2018. Diakses dari <https://www.BAZNAS.go.id> . Pada tanggal 10 Januari 2020.
- Badan Pusat Statistik. 2010. PDB Indonesia Berdasarkan Pengeluaran tahun 2008-2010. Diakses dari <https://www.bps.go.id>. Pada Tanggal 20 Januari 2020.

- Badan Pusat Statistik. 2019. PDB Indonesia Berdasarkan Pengeluaran tahun 2010-2018. Diakses dari <https://www.bps.go.id>. Pada Tanggal 20 Januari 2020.
- Deti, sari dkk. 2017. Kontribusi Perbankan Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Sambas. *Jurnal Diskursus Islam*, 5 (2), 61-82.
- Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. DSN-MUI. [Online] Available at: <https://dsnmu.or.id/category/fatwa> [Accessed 6 Ferbuari 2020].
- Faiza, Nurlaili dan Shofiyatun. 2018. Pengaruh Outsanding Sukuk Korporasi Terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. *Jurnal el-Qist*,08(01), 1577-1596
- Fajar, Muhammad. 2018. indikator Sederhana Untuk Mengukur Kesejahteraan. Paper Badan Pusat Statistik.
- Hidayati, Sri Endah.2019. Analisis Pengaruh Secara Simultan Sukuk dan Variabel Makro Ekonomi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Periode Tahun 2014-2018. Skripsi, 1-166.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2009. Stastistik perbankan Syariah – Desember 2009. Diakses dari <https://www.ojk.go.id>. Pada tanggal 15 Maret 2020.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2009. Stastistik Sukuk Syariah – Desember 2009. Diakses dari <https://www.ojk.go.id>. Pada tanggal 15 Maret 2020.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2010. Stastistik perbankan Syariah – Desember 2010. Diakses dari <https://www.ojk.go.id>. Pada tanggal 15 Maret 2020.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2010. Stastistik Sukuk Syariah – Desember 2010. Diakses dari <https://www.ojk.go.id>. Pada tanggal 15 Maret 2020.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2011. Stastistik perbankan Syariah – Desember 2011. Diakses dari <https://www.ojk.go.id>. Pada tanggal 15 Maret 2020.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2011. Stastistik Sukuk Syariah – Desember 2011. Diakses dari <https://www.ojk.go.id>. Pada tanggal 15 Maret 2020.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2012. Stastistik perbankan Syariah – Desember 2012. Diakses dari <https://www.ojk.go.id>. Pada tanggal 15 Maret 2020.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2012. Stastistik Sukuk Syariah – Desember 2012. Diakses dari <https://www.ojk.go.id>. Pada tanggal 15 Maret 2020.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2013. Stastistik perbankan Syariah – Desember 2013. Diakses dari <https://www.ojk.go.id>. Pada tanggal 15 Maret 2020.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2013. Stastistik Sukuk Syariah – Desember 2013. Diakses dari <https://www.ojk.go.id>. Pada tanggal 15 Maret 2020.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2014. Stastistik perbankan Syariah– Desember 2014. Diakses dari <https://www.ojk.go.id>. Pada tanggal 15 Maret 2020.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2014. Stastistik Sukuk Syariah– Desember 2014. Diakses dari <https://www.ojk.go.id>.

- Pada tanggal 15 Maret 2020.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2015. Stastistik perbankan Syariah – Desember 2015. Diakses dari <https://www.ojk.go.id>. Pada tanggal 15 Maret 2020.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2015. Stastistik Sukuk Syariah – Desember 2015. Diakses dari <https://www.ojk.go.id>. Pada tanggal 15 Maret 2020.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2016. Stastistik perbankan Syariah – Desember 2016. Diakses dari <https://www.ojk.go.id>. Pada tanggal 15 Maret 2020.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2016. Stastistik Sukuk Syariah – Desember 2016. Diakses dari <https://www.ojk.go.id>. Pada tanggal 15 Maret 2020.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2017. Stastistik perbankan Syariah – Desember 2017. Diakses dari <https://www.ojk.go.id>. Pada tanggal 15 Maret 2020.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2017. Stastistik Sukuk Syariah – Desember 2017. Diakses dari <https://www.ojk.go.id>. Pada tanggal 15 Maret 2020.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2018. Stastistik perbankan Syariah – Desember 2018. Diakses dari <https://www.ojk.go.id>. Pada tanggal 15 Maret 2020.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2018. Stastistik Sukuk Syariah – Desember 2018. Diakses dari <https://www.ojk.go.id>. Pada tanggal 15 Maret 2020.
- Tambunan, khairina. 2016. Analisis Pengaruh Investasi, Operasi Moneter Dan ZIS Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Jurnal At-Tawassuth*, 1(1), 1-22.
- Taniredja, T., & Mustafidah, H. (2014). penelitian kuantitatif (sebuah pengantar). Bandung: ALFABETA.
- Terminanto, Ade Ananto. 2017. Pengaruh Belanja Pemerintah Dan Pembiayaan Bank Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Studi Kasus Data Panel Provinsi Di Indonesia. *Jurnal Istishadia*, 10(1), 97-129